



Pertahankan Gelar WTP

Endang Kusmiyati
Borneo Tribun, Sintang

DENGAN dianugerahkannya predikat opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Pemkab Sintang Bertekad untuk tetap mempertahankannya pada setiap tahun anggaran kedepannya. Predikat WTP yang diberikan oleh

BPK tersebut merupakan harapan seluruh masyarakat kabupaten Sintang, oleh sebab itu kepada seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang serta elemen masyarakat bisa mempertahankannya pada masa yang akan datang," ungkap Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si kepada wartawan belum lama ini.

....Ke Halaman -11

Pertahankan Gelar WTP

Ia menuturkan bahwa hasil predikat WTP bukan hanya kerja Bupati Sintang akan tetapi berkat kerja keras seluruh para staf dan Kepala SKPD yang ada dilingkup Pemkab Sintang dengan cara terus menerus melakukan pembenahan pengelolaan keuangan. "Saya tentu sangat berterima kasih kepada yang telah bekerja keras sehingga akhirnya Kabupaten Sintang mendapatkan opini WTP," tutur Milton. Milton Menilai Dengan diraihnya predikat WTP tersebut, menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban / Keuangan Bupati dan jajaran sudah ke arah yang lebih baik,

transparansi, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. "Inilah wujud reformasi birokrasi yang selama ini kita bangun," ujarnya.

Berkaca pada hasil opini WDP pada tahun lalu, Pemkab Sintang terus melakukan pembenahan. Sehingga Berbekal hasil opini WDP tahun lalu Pemkab Sintang mampu meraih opini WTP pada anggaran tahun 2012.

Pemkab Sintang juga berencana akan menambah tenaga pengawas sehingga dengan harapan Opini WTP yang diraih kabupaten Sintang akan terus dipertahankan. "Untuk pengawas nantinya akan kami tam-

bah. Harapnya WTP

tetap bertahan ditahun yang akan datang," tukasnya. Banyak hal yang menurut Milton menjadi perhatian dalam menerima WTP.

Salah satunya adalah pengelolaan aset. Baik aset Pemkab yang bersifat barang mati maupun barang Hidup. "Kalau Aset keseluruhannya harus

tercatat. Sampai pohon yang ditanam Pemkab juga harus tercatat. Jika mati harus ada berita acara. Pengelolaan aset seperti hal itu memang

tergolong kecil. Namun jika tidak dilakukan sangat mustahil Pemkab mendapat opini WTP. □